



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 165 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwodadi untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Purwodadi yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Purwodadi serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

Renja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Purwodadi dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Purwodadi tahun lalu.

#### Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN,
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Purwodadi dalam menyusun RKA Kecamatan Purwodadi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 165

# **RENJA (RENCANA KERJA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
OPD KECAMATAN PURWODADI**

**Jl. Raya Purwodadi No. 54 Desa Purwodadi  
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan  
PURWODADI 67163**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : TAHUN 2023  
TANGGAL : 2023

---

**RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN PURWODADI**  
**KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Purwodadi. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Purwodadi mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun didasarkan pada RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Purwodadi tahun 2024-2026. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah dengan menuangkan visi, misi, strategi, sasaran, kebijakan, program serta

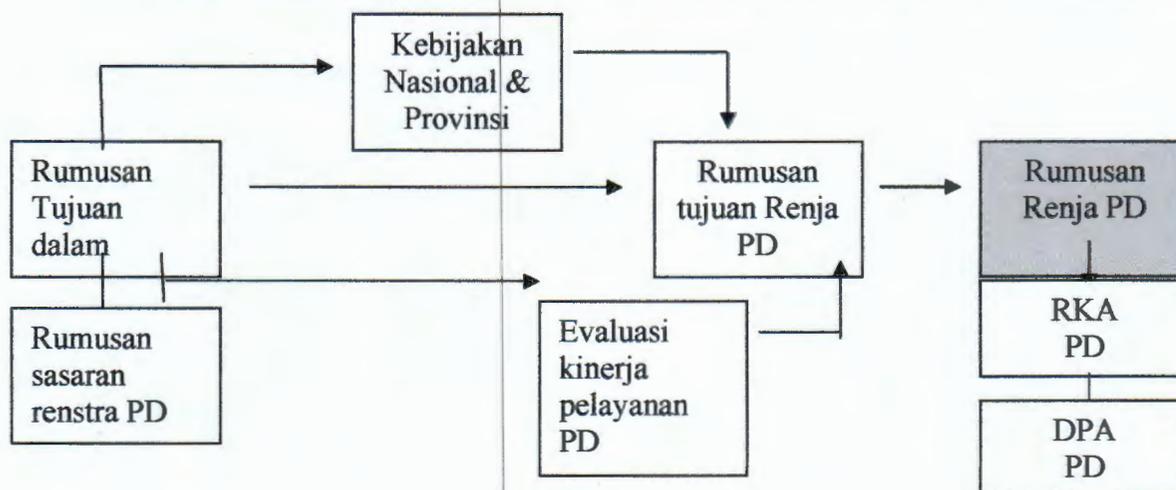
kegiatan dengan mencantumkan ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 menggambarkan visi, misi, strategi, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan Kecamatan Purwodadi. Komponen yang ada mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis dan strategis untuk mengimplementasikan sasaran – sasaran daerah yang telah dituangkan dalam pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi tidak lepas dari pengamatan potensi daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Purwodadi. Pengembangan dan pemantapan potensi yang meliputi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia terus dikembangkan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Purwodadi pada khususnya dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya, sebagaimana diagram dibawah ini :

#### Perumusan tujuan & sasaran rencana kerja perangkat daerah



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengendalian, dan Tata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahann Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwodadi untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Purwodadi merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari strategi dan arah kebijakan serta program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwodadi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Purwodadi untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;
3. Renja Kecamatan Purwodadi merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Purwodadi pada Tahun 2024 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Purwodadi.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Purwodadi merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Purwodadi yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Purwodadi, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Purwodadi pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Purwodadi yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Purwodadi dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Purwodadi, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Purwodadi sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwodadi;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Purwodadi.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .....tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang dikeluarkan setiap tahunnya pada Bulan Juni)
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
28. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala

BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kab Pasuruan
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Renstra Kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Purwodadi adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Purwodadi dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja PD Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut:

1. Renja PD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja PD disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Purwodadi

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja PD Kecamatan Purwodadi disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

##### 1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

## **BAB V : Penutup**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2022 merupakan pertengahan tahun dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Purwodadi (Renstra 2018-2023), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2022 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Purwodadi sebesar Rp. 2.977.187.998,- (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah). Dari Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.902.213.264,- (Dua milyar Sembilan ratus dua juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) atau mencapai 97,48 % Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purwodadi tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Purwodadi , yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Purwodadi tahun berjalan (tahun 2022). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Purwodadi sampai dengan tahun 2022, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>URUSAN DAERAH</b>	<b>2.919.375.598,-</b>	<b>2.848.278.314,-</b>	<b>97,56</b>
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>2.681.079.082,-</b>	<b>2.632.951.645,-</b>	<b>98,20</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>			
1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.244.962.090,-	<b>2.203.403.673,-</b>	98,15
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400.516.992,-	<b>393.947.972,-</b>	98,36
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.600.000,-	<b>35.600.000,-</b>	100
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>123.384.720,-</b>	<b>110.565.500,-</b>	<b>89,61</b>
<b>PENYEDIAAN PERANGKAT</b>			

<b>DAERAH</b>				
<b>SUB KEGIATAN</b>				
1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	59.167.350,-	58.869.200,-	99,50	
2. Penyediaan peralatan rumah tangga	2.930.670,-	702.200,-	23,96	
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.597.700,-	4.487.900,-	97,61	
4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56.689.000,-	56.156.000,-	99,06	
<b>KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>26.030.000,-</b>	<b>21.718.675,-</b>	<b>83,44</b>	
<b>SUB KEGIATAN</b>	26.030.000,-	21.718.675,-	83,44	
1. Penyediaan Jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik				
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>219.849.800,-</b>	<b>44.067.721,-</b>	<b>20,04</b>	
<b>SUB KEGIATAN</b>	48.831.800,-	44.067.721,-	90,24	
1. Pemeliharaan jasa, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				
2. Pemeliharaan peralatan & mesin lainnya	8.047.800,-	6.982.000,-	86,76,-	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>4.650.000,-</b>	<b>4.650.000,-</b>	<b>100,00</b>	
<b>KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN</b>	<b>4.650.000,-</b>	<b>4.650.000,-</b>	<b>100,00</b>	
<b>SUB KEGIATAN</b>				
1. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	4.650.000,-	4.650.000,-	100,00	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>18.189.000,-</b>	<b>18.120.000,-</b>	<b>99,62</b>	
<b>KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>18.189.000,-</b>	<b>18.120.000,-</b>	<b>99,62</b>	
<b>SUB KEGIATAN</b>				
1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.189.000,-	18.120.000,-	99,62	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>22.500.000,-</b>	<b>22.485.000,-</b>	<b>99,93</b>	
<b>KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>22.500.000,-</b>	<b>22.485.000,-</b>	<b>99,93</b>	
<b>SUB KEGIATAN</b>				
1. Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia ,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	9.000.000,-	8.985.000,-	99,83	
2. Harmonisasi hubungan dengann tomag dan tomas	13.500.000,-	13.500.000,-	100,00	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(2.977.187.998,- )</b>	<b>(2.902.213.264,-)</b>	<b>97,48</b>	

Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh PD Kecamatan Purwodadi melalui tabel Tabel T-C.29 berikut :

Dari tabel diatas terlihat ada realisasi kinerja hampir semua kegiatan sudah memenuhi target kinerja dan yang tidak memenuhi hanya pada kegiatan dan tidak memenuhi target adalah kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya hal ini dikarenakan keterbatasan waktu sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, namun secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Purwodadi sampai dengan triwulan keempat tahun 2022, telah dilaksanakan sesuai dengan Renja dan Renstra yang telah ditetapkan. Adapun apabila dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan juga dijumpai pula beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dapahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan.
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Purwodadi dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishmen), dan kesejahteraan

- pegawai;
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Purwodadi dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
  3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
    - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
    - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan;

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka susunan organisasi Kecamatan Purwodadi dimaksud terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan yang terdiri :
  - a. Kasubag Umum & Kepegawaian
  - b. Kasubag Penyusunan Program & Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan
- b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

PD Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwodadi akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Purwodadi dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Sukorejo meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

### 1. Lingkungan Internal

#### **Kekuatan :**

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

#### **Kelemahan**

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

### 2. Lingkungan Eksternal

#### **Peluang**

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 Tahap kedua (2010-2015)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

#### **Ancaman :**

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui Tabel T-C.30 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase jenis pelayanan yang berkualitas			100%	100%			100%				
	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina			100%	100%			100%				
	Persentase konflik yang tertangani diwilayah kecamatan			83%	85%			83%				
	Nilai SAKIP Kecamatan			70,00	71,50			71,39				
	Tujuan							3,47	3,49	3,51	3,75	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan											
	Sasaran											
1	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan							100%	100%	100%	100%	
2	Nilai SAKIP PD							71,39	71,50	73	74	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Purwodadi, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Purwodadi adalah dengan adanya otonomi desa, maka sumber dana baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun pusat mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan infrastruktur di tingkat desa, tentunya dengan pendampingan dan monitoring oleh aparatur kecamatan. Saat ini desa telah dilengkapi dengan berbagai aplikasi misal Siskeudes , Pak Ladi untuk melakukan perencanaan kegiatan maupun pelayanan terhadap masyarakat, sehingga mempermudah sistem kerja mulai tahap

perencanaan, penganggaran hingga pelaporan tinggal kualitas SDM dari aparaturnya yang perlu ditingkatkan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja PD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti

kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh PD Kecamatan Purwodadi sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja PD seperti pada Tabel T-C.31 berikut :

**Tabel 2.3**  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah :Kecamatan Purwodadi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kec.Purwodadi</b>	<b>1. Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.105.960.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kec.Purwodadi</b>	<b>1. Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.105.960.000</b>	
			2. Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan	100	%				2. Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan	100	%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100	%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100	%	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat disajikan secara akurat	100	%	2.709.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat disajikan secara akurat	100	%	2.709.960.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Purwodadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	orang/bulan	2.270.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Purwodadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	orang/bulan	2.270.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	399.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	399.960.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	40.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100	%	5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100	%	5.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	%	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	%	10.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	paket	5.000.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	2.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	2.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Purwodadi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	orang/tahun	3.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Purwodadi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	orang/tahun	3.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100	%	135.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100	%	135.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	18.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	18.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	10.000.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	10.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	85.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100	%	55.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100	%	55.000.000
	Pengadaan Mebel	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kec.Purwodadi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	20.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Purwodadi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Purwodadi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	unit	25.000.000
	Pengadaan Peralatan Aset Lainnya	Kec.Purwodadi	Jumlah Unit Peralatan aset Lainnya yang Disediakan	2	unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan Aset Lainnya	Kec.Purwodadi	Jumlah Unit Peralatan aset Lainnya yang Disediakan	2	unit	10.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100	%	36.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Purwodadi	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100	%	36.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	28.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	28.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	8.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	%	150.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	%	150.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Purwodadi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Purwodadi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	90.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Kec.Purwodadi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec.Purwodadi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	unit	5.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Purwodadi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Purwodadi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	unit	5.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Purwodadi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Purwodadi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	unit	50.000.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec.Purwodadi	<b>1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>38.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec.Purwodadi	<b>1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>38.000.000</b>
			<b>2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan</b>	<b>3,51</b>					<b>2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan</b>	<b>3,51</b>		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Purwodadi	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan instansi terkait	2	laporan	20.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Purwodadi	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan instansi terkait	2	laporan	20.000.000
	Koordinasi/ sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi yang ada di Kecamatan	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi yang ada di Kecamatan	2	laporan	20.000.000	Koordinasi/ sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi yang ada di Kecamatan	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi yang ada di Kecamatan	2	laporan	20.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Kec.Purwodadi	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu berdasarkan Daftar	4	laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Kec.Purwodadi	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu berdasarkan Daftar	4	laporan	10.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	10.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Purwodadi	Persentase Realisasi PBB-P2	4	laporan	8.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Purwodadi	Persentase Realisasi PBB-P2	4	laporan	8.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Monev dan Pelaporan PBB)	4	laporan	8.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Monev dan Pelaporan PBB)	4	laporan	8.000.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec.Purwodadi	<b>1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec.Purwodadi	<b>1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>40.000.000</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Purwodadi	Persentase hasil evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang di tindak lanjuti	100	%	40.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Purwodadi	Persentase hasil evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang di tindak lanjuti	100	%	40.000.000
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Purwodadi	Jumlah Lap Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	35.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Purwodadi	Jumlah Lap Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	35.000.000

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Purwodadi	Jumlah Lap Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	laporan	5.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Purwodadi	Jumlah Lap Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	laporan	5.000.000
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec.Purwodadi	<b>Persentase Penanganan gangguan Trantibum</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>27.500.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec.Purwodadi	<b>Persentase Penanganan gangguan Trantibum</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>27.500.000</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Purwodadi	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100	%	27.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Purwodadi	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100	%	27.500.000
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi	4	laporan	7.500.000	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi Vertikal di Wilayah	4	laporan	7.500.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	20.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Purwodadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	20.000.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kec.Purwodadi	<b>Persentase konflik SARA sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kec.Purwodadi	<b>Persentase konflik SARA sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>10.000.000</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Purwodadi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Purwodadi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	laporan	10.000.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Purwodadi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PHBN, Hari Jadi Kabupaten Pasuruan, Hari Santri)	200	orang	10.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Purwodadi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PHBN, Hari Jadi Kabupaten Pasuruan, Hari Santri)	200	orang	10.000.000
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec.Purwodadi	<b>Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec.Purwodadi	<b>Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>25.000.000</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Kec.Purwodadi	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan	100	%	25.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Kec.Purwodadi	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	100	%	25.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Buku Administrasi Desa dan buku ledak desa)	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Buku Administrasi Desa dan buku ledak desa)	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa (Verifikasi Laporan Keuangan Desa)	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa (Verifikasi Laporan Keuangan Desa)	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Purwodadi	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja OPD Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Renja PD Kecamatan Purwodadi saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan OPD Kecamatan Purwodadi mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Purwodadi dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan sseperti pada Tabel T-C.32 berikut :

**Tabel 2.4**

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwodadi

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Desa tambaksari Kec.Purwodadi		1 Paket	
	Giat Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediaasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediaasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan		hasil musrenbang Kab Pasuruan yang di ampuh oleh Bakesbang Pol Kab Pas
	PROGRAM PENATAAN DESA	Desa Gerbo Kec Purwodadi		1 Paket	
	Giat Penyelenggaraan Penataan Desa		Meningkatnya Produksi Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah		hasil musrenbang Kab Pasuruan yang di ampuh oleh DPMD Kab Pas
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Terlaksananya giat fasilitasi sarana & prasarana desa berupa rehab gapuraa desa		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Desa Parerejo Kec Purwodadi		1 Paket	
	Giat Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia		hasil musrenbang Kab Pasuruan yang di ampuh oleh Dinas Perpustakaan & Arsip Kab Pas
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah giat Pengembangan Kampung Literasi untuk 4 lokasi Kampung literasi se Kabupaten mendukung kegiatan literasi berbasis inklusi sosial		

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Purwodadi telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Adapun prioritas atau grand design /RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 yang telah memasuki tahun kelima adalah peningkatan keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat serta pelayanan public yang berkualitas dan didukung oleh profesionalitas sumber daya aparatur maka Kecamatan Purwodadi tahun 2024 akan turut mendukung prioritas tahun pertama Kabupaten Pasuruan dengan beberapa kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan peningkatan SDM aparatur guna peningkatan pelayanan public yang berkualitas.

##### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategik ini, maka Kecamatan Purwodadi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Pasuruan untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dalam mencapai Tujuan dan sasarannya menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP PD

Sasaran 2 : Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan

Indikator Kinerja : Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global.
- d. Memiliki integritas moral, etik, spiritual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai – nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran strategik Kecamatan Purwodadi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategis Kecamatan Purwodadi pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

#### **3.3.1 Program/ Kegiatan Prioritas**

- Prioritas atau grand design /RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah peningkatan pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan , maka Kecamatan Purwodadi turut mendukung dalam hal tersebut diatas dengan beberapa program dan kegiatan pada tahun 2024 anatara lain
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

##### **Sub Kegiatan**

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

##### **Sub Kegiatan :**

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan

##### **Sub Kegiatan**

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Keiatann Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

##### **Sub Kegiatan :**

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**  
**Tahun 2024**

<b>Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Proyeksi 2023</b>	<b>Target 2024</b>
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima</b>	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	71,39		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	100%		
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	100%		
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	83%		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD		71,50	73
	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	100%

### 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

#### 3.3.2. Program/ Kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan Rencana Kerja tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempergunakan aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Perencanaan Daerah dengan tujuan untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan penganggaran pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah Purwodadi merencanakan melaksanakan 6 program program yang dijabarkan dalam 15 kegiatan. Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program dan kegiatan yang dimaksud. Untuk kegiatan-kegiatan rutin, dialokasikan pada kantor Kecamatan Purwodadi, sedangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target kinerja Kecamatan Jatibanteng disesuaikan dengan sasaran target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026. Penjabaran program dan kegiatan Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebagaimana berikut :

#### PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan :

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

### 3. Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

#### - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan

#### 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

#### - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan :

#### 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

#### 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

#### 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

#### 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

#### 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

##### Sub Kegiatan :

#### 1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

#### - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

##### Sub kegiatan :

#### 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

#### - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### - Sub Kegiatan:

#### 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

#### 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### • PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

#### - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

##### Sub Kegiatan :

#### 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama & tokoh masyarakat

Merujuk pada PP No. 12 Tahun 2019 dan permendagri 90 tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodefikasi nomenklatur sesuai permendagri 90 tahun 2019. Adapun kegiatan

**Tabel 4**  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwodadi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi	Kec.Purwodadi	100%	3.105.096.000				3.121.489.800
		2. Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan		100%					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	Kec.Purwodadi	100%	5.000.000				5.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Purwodadi	4 Dok	Belanja operasi : Rp 5.000.000	DAU		4 Dok	5.500.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Kec.Purwodadi	100%	2.709.960.000				3.165.669.600
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Purwodadi	16 orang/ bulan	Belanja operasi : Rp 2.270.000.000	DAU		16 orang/ bulan	2.723.509.800
					Belanja pegawai : Rp 2.270.000.000				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Purwodadi	12 Dok	Belanja operasi : Rp 399.960.000	DAU		12 Dok	401.959.800
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 399.960.000				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Purwodadi	12 Dok	Belanja operasi : Rp 40.000.000	DAU		12 Dok	40.200.000
					Belanja pegawai : Rp 40.000.000				
					Belanja barang : Rp -				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/ dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	Kec.Purwodadi	100%	Rp 5.000.000				5.025.000

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Purwodadi	4 Lap	Belanja operasi : Rp 5.000.000	DAU		4 Lap	5.025.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang : Rp 5.000.000				
					Rp 10.000.000				Rp 10.050.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Kec.Purwodadi	100%					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec.Purwodadi	1 paket	Belanja operasi : Rp 5.000.000	DAU		1 paket	5.050.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang : Rp 5.000.000				
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec.Purwodadi	4 Dok	Belanja operasi : Rp 2.000.000	DAU		4 Dok	2.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang : Rp 2.000.000				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec.Purwodadi	2 orang/ tahun	Belanja operasi : Rp 3.000.000	DAU		2 orang/ tahun	3.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang : Rp 3.000.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	Kec.Purwodadi	100%	Rp 135.000.000				Rp 135.665.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Purwodadi	4 Paket	Belanja operasi : Rp 5.000.000	DAU		4 Paket	5.050.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Purwodadi	4 Paket	Belanja operasi : Rp 5.000.000	DAU		4 Paket	5.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 5.000.000				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Purwodadi	1 Paket	Belanja operasi : Rp 2.000.000	DAU		1 Paket	2.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				

					Belanja barang dan jasa : Rp	5.000.000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Purwodadi	4 Paket	Belanja operasi : Rp	18.000.000	DAU	4 Paket	18.090.000
					Belanja pegawai : Rp	-			
					Belanja barang dan jasa : Rp	18.000.000			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Purwodadi	4 Paket	Belanja operasi : Rp	10.000.000	DAU	4 Paket	10.050.000
					Belanja pegawai : Rp	-			
					Belanja barang dan jasa : Rp	10.000.000			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Purwodadi	12 laporan	Belanja operasi : Rp	10.000.000	DAU	12 laporan	10.050.000
					Belanja pegawai : Rp	-			
					Belanja barang dan jasa : Rp	10.000.000			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Purwodadi	12 laporan	Belanja operasi : Rp	85.000.000	DAU	12 laporan	85.425.000
					Belanja pegawai : Rp	-			
					Belanja barang : Rp	85.000.000			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	Kec.Purwodadi	100%	Rp	55.000.000			Rp 55.275.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec.Purwodadi	2 Unit	Rp	20.000.000	DAU	2 Unit	20.100.000
					Belanja operasi : Rp	-			
					Belanja pegawai : Rp	-			
					Belanja barang dan jasa : Rp	-			
					Belanja modal : Rp	20.000.000			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Purwodadi	4 Unit	Rp	25.000.000		4 Unit	25.125.000
					Belanja operasi : Rp	-	DAU		
					Belanja pegawai : Rp	-			

					Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	25.000.000			2 Unit
	Pengadaan Peralatan Aset Lainnya	Jumlah Unit Peralatan aset Lainnya yang Disediakan	Kec.Purwodadi	2 Unit		Rp	10.000.000			10.050.000
					Belanja operasi	: Rp	-	DAU		
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	10.000.000			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Kec.Purwodadi	100%			28.000.000			28.140.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Purwodadi	12 laporan	Belanja operasi	: Rp	28.000.000	DAU	12 laporan	28.140.000
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang	: Rp	28.000.000			
						Rp	100.000.000			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Purwodadi	100%						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Purwodadi	5 unit	Belanja operasi	: Rp	90.000.000	DAU	5 unit	90.450.000
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp	90.000.000			
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec.Purwodadi	12 unit	Belanja operasi	: Rp	5.000.000	DAU	12 unit	
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp	5.000.000			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Purwodadi	12 unit	Belanja operasi	: Rp	5.000.000	DAU	12 unit	
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp	5.000.000			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec.Purwodadi	1 unit	Belanja operasi	: Rp	50.000.000	DAU	1 unit	
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang	: Rp	50.000.000			
						Rp	38.000.000			Rp 38.190.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu</b>	<b>Kec.Purwodadi</b>	<b>100%</b>						

		<b>2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan</b>		<b>3,51</b>					
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi	Kec.Purwodadi	2 lap		Rp 20.000.000				Rp 20.190.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kec.Purwodadi	2 lap		Belanja operasi : Rp 20.000.000	DAU		2 lap	20.190.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 20.000.000				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup	Kec.Purwodadi	4 lap		Rp 10.000.000				Rp 10.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kec.Purwodadi	4 lap		Belanja operasi : Rp 10.000.000	DAU		4 lap	10.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	Kec.Purwodadi	4 lap		Rp 8.000.000				Rp 8.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Monev dan	Kec.Purwodadi	4 lap		Belanja operasi : Rp 8.000.000	DAU		4 lap	8.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang : Rp 8.000.000				
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif</b>	<b>Kec.Purwodadi</b>	<b>100%</b>		<b>Rp 40.000.000</b>				<b>40.200.000</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Kec.Purwodadi	100%		Rp 40.000.000				40.200.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Kec.Purwodadi	4 lap		Belanja operasi : Rp 35.000.000	DAU		4 lap	35.175.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 35.000.000				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lap Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Purwodadi	4 lap		Belanja operasi : Rp 5.000.000	DAU		4 lap	5.025.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang : Rp 5.000.000				
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan gangguan Trantibum</b>	<b>Kec.Purwodadi</b>	<b>100%</b>		<b>Rp 27.500.000</b>				<b>27.637.500</b>

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	Kec.Purwodadi	100%	Rp 27.500.000				Rp 27.637.500
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Purwodadi	4 lap	Belanja operasi : Rp 7.500.000	DAU		4 lap	7.537.500
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 7.500.000				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Purwodadi	4 lap	Belanja operasi : Rp 20.000.000	DAU		4 lap	20.100.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang : Rp 20.000.000				
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase konflik SARA sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan</b>	<b>Kec.Purwodadi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 10.000.000</b>				<b>10.050.000</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Kec.Purwodadi	100%	Rp 10.000.000				10.050.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PHBN, Hari Jadi Kabupaten Pasuruan, Hari Santri)	Kec.Purwodadi	1 lap	Belanja operasi : Rp 10.000.000	DAU		1 lap	10.050.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000				
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik</b>	<b>Kec.Purwodadi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 25.000.000</b>				<b>25.125.000</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang	Kec.Purwodadi	100%	Rp 25.000.000				25.125.000

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Buku Administrasi Desa x banyak	Kec.Purwodadi	12 dokumen	Belanja operasi : Rp 10.000.000	DAU		12 dokumen	10.050.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa (Verifikasi Laporan Keuangan	Kec.Purwodadi	12 dokumen	Belanja operasi : Rp 10.000.000	DAU		12 dokumen	10.050.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000				
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	Kec.Purwodadi	1 Dokumen	Belanja operasi : Rp 5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.025.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang : Rp 5.000.000				
					Total Belanja operasi : Rp 3.191.460.000				3.207.417.300
					Belanja pegawai : Rp 2.310.000.000				2.763.709.800
					Belanja barang dan jasa : Rp 881.460.000				443.707.500
					Belanja bunga : Rp -				-
					Belanja subsidi : Rp -				-
					Belanja hibah : Rp -				-
					Belanja bantuan sosial : Rp -				-
					Total Belanja modal : Rp 55.000.000				55.275.000
					Total Belanja tidak terduga : Rp -				-
					Total Belanja transfer : Rp -				-
					Total Belanja PD : Rp 3.246.460.000				3.262.692.300

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan tahun 2024 dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DAU
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	DAU

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	DAU
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DAU
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DAU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Meubelair	DAU
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	DAU
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DAU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU
			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	DAU
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	DAU
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DAU
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	DAU

			di Desa	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	DAU
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama & tokoh masyarakat	DAU
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	DAU

			Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
6	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	DAU  DAU  DAU

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN**

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purwodadi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Purwodadi

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Purwodadi dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

#### **5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

### **5. 3. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk rencana tindak lanjut maka dilaksanakan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat serta pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amien.

## BAB V PENUTUP

Renja SKPD Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena terdapat hal-hal yang menuntut adanya penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.

Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Purwodadi beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Purwodadi Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Penetapan Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF